

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian utama diseluruh dunia. Pandemi ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi, menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, krisis pangan, memperburuk ketimpangan gender, mengganggu sistem pendidikan, serta kesehatan masyarakat di setiap negara yang mengganggu kesejahteraan sosial (United Nations, 2021). Pandemi COVID-19 yang berlangsung pada tahun 2020 mengakibatkan emisi gas rumah kaca menurun hingga 7%, menjadikannya sebagai penurunan tahunan terbesar yang pernah tercatat. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penerapan kebijakan lockdown yang membatasi aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas masyarakat (Emma, 2020). Namun ditahun yang sama, pandemi COVID-19 juga meningkatkan jumlah limbah medis dan sampah plastik yang justru memperburuk krisis ekologi global dan menghambat keberlanjutan lingkungan hidup.

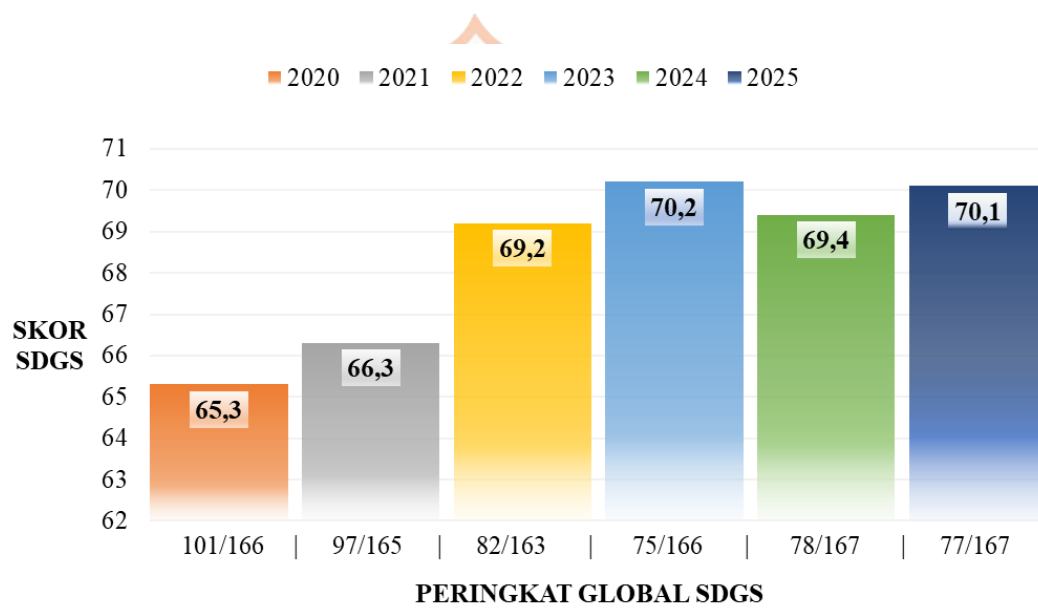
Krisis ekologi mengacu pada keadaan ketika fungsi dan kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat tekanan dari aktivitas manusia, sehingga memengaruhi stabilitas ekosistem serta keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup. Persoalan krisis ekologi itu sendiri sebenarnya bukanlah isu yang baru; bahkan dampak-dampaknya pun sudah sangat terasa. Mulai dari perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan bencana alam, kehilangan keanekaragaman hayati, kekeringan dan kelangkaan air, Dalam *GlobalRisk Report 2021* yang diterbitkan oleh *World EconomicForum*, krisis ekologi menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi dunia saat ini dan dapat mempengaruhi keberlanjutan hidup

manusia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologi akan terus memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan, mengancam kesehatan dan kesejahteraan manusia, mengancam keamanan pangan dan air, dan menghambat pencapaian SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah serangkaian tujuan global yang ditujukan untuk menanggulangi persoalan-persoalan utama yang dihadapi dunia seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan, melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Agenda ini secara resmi diadopsi pada 25 September 2015 dalam Sidang Umum PBB dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara, termasuk Indonesia, sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pembangunan global. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang pelaksanaannya berlangsung selama periode 2016–2030. Seluruh tujuan tersebut diarahkan untuk menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Sekar Panuluh & Fitri, 2015). Karena bersifat universal, SDGs berlaku bagi seluruh negara tanpa memandang tingkat pembangunannya, sehingga baik negara berkembang maupun negara maju memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan setiap tujuan dan target.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 yang memperkuat pelaksanaan pencapaian TPB melalui penyelarasan dengan target

pembangunan berkelanjutan di tingkat global dan nasional, percepatan implementasi program, peningkatan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, serta pengembangan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif. Penerapan berbagai kebijakan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Hal ini tercermin dalam hasil *Sustainable Development Report* yang dipublikasikan setiap tahun melalui situs resmi SDG Transformation Center, yang menyajikan peringkat negara berdasarkan skor keseluruhan sebagai indikator capaian terhadap tujuan-tujuan SDGs. Berikut merupakan data SDGs Indonesia:



Gambar 1.1 Peringkat dan Skor Indeks SDGs Indonesia

(Sumber : Data Diolah, 2026)

Berdasarkan gambar tersebut bisa dilihat ditahun 2023 Indonesia menempati peringkat ke-75 dengan skor 70,2. Peringkat tersebut menempatkan sejumlah negara ASEAN di bawahnya, termasuk Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan empat tahun

sebelumnya, dimana ditahun 2020 Indonesia berada di peringkat 101 dengan skor 65,3. Peringkat SDGs yang dicapai suatu negara juga mencerminkan seberapa baik kualitas lingkungan hidup di negara tersebut.

Tabel 4.1

Indikator Status 17 Tujuan SDGs

Tahun	Indikator Status 17 SDGs			
	Goal Achievement	Challenges remain	Significant challenges	Major challenges
2020	-	3	7	7
2021	-	3	5	9
2022	-	3	7	7
2023	-	3	8	6
2024	-	4	8	5
2025	-	3	6	8

(Sumber : Data Diolah, 2026)

Dari 17 tujuan SDGs selama periode 2020-2025, indikator status pencapaian SDGs Indonesia menunjukkan bahwa belum ada yang masuk dalam kategori status berwarna hijau yang berarti tujuan tercapai (*Goal Achievement*). Kategori status berwarna kuning yang berarti tantangan tetap ada (*Challenges remain*) berisi 3 tujuan yang sama selama 6 tahun terakhir yaitu tujuan 4 pendidikan berkualitas, tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan tujuan 13 penanganan dan perubahan iklim. Sementara 14 tujuan lainnya terus mengalami perubahan status antara warna orange yang berarti tantangan signifikan (*Significant Challenges*) dan warna merah yang berarti tantangan utama (*Major Challenges*) setiap tahunnya.

Dengan beberapa tujuan yang masih stagnan dan menjadi tantangan utama, Indonesia perlu memprioritaskan beberapa tujuan yang terus masuk dalam kategori

status merah. Berdasarkan *sustainable development report* selama periode 2020 hingga 2023 terdapat 3 tujuan yang konsisten berada dalam status merah yaitu tujuan 2 tanpa kelaparan, tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, dan tujuan 15 ekosistem daratan.

Namun walaupun ada peningkatan pada data tersebut, peringkat SDGs Indonesia masih kalah dengan negara Singapura, Thailand, dan Vietnam serta mengalami stagnan di beberapa tujuan SDGs. Berdasarkan laporan Global Hunger Index (GHI) tahun 2023 tingkat kelaparan di Indonesia berada pada peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara, di bawah Timor Leste dengan perolehan skor 16,9. Data deforestasi Indonesia yang dilaporkan oleh Auriga Nusantara menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2021, dengan lonjakan pada tahun 2025 dengan luas deforestasi mencapai 158.283 Hektar, Sumatra (144.150 Ha), dan Papua (77.678 Ha). Wilayah Kalimantan dan Sumatra merupakan daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Hampir setengah dari total deforestasi, yaitu sebesar 47,29%, terjadi di kawasan konsesi, terutama pada Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang masing-masing mencakup 36.247 hektare dan 29.941 hektare. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan perusahaan swasta, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan HTI, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap laju deforestasi di Indonesia. Dari 17 tujuan SDGs selama periode 2020-2025, indikator status pencapaian SDGs Indonesia menunjukkan bahwa belum ada yang masuk dalam kategori status berwarna hijau yang berarti tujuan tercapai (*Goal Achievement*). Kategori status berwarna kuning yang berarti tantangan tetap ada (*Challenges remain*) berisi 3 tujuan yang sama selama 6 tahun terakhir yaitu tujuan

4 pendidikan berkualitas, tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan tujuan 13 penanganan dan perubahan iklim. Sementara 14 tujuan lainnya terus mengalami perubahan status antara warna orange yang berarti tantangan signifikan (*Significant Challenges*) dan warna merah yang berarti tantangan utama (*Major Challenges*) setiap tahunnya.

Dikutip dari Kompas.id PT Toba Pulp Lestari Tbk. melakukan pembabatan hutan alam seluas sedikitnya 758 hektar di dalam konsesi PT TLP sejak tahun 2021 hingga akhir 2025. Izin PT TPL Bersama 27 perusahaan lain akhirnya dicabut oleh pemerintah pada Januari 2026 karena dinilai melanggar aturan dan berkontribusi pada bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra. Di tahun 2024 PT Industrial Forest Plantation bersama dengan PT Mayawana Persada, didesak oleh 18 organisasi dari berbagai negara agar sertifikasi Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)-nya dicabut. Berdasarkan audit, PT Industrial Forest Plantation tercatat telah membuka lahan seluas 29.075 hektar pada tahun 2024, dan total pembukaan lahan sejak 2010 mencapai 34.740 hektar di Kalimantan (SatyaBumi, 2026). Aktivitas deforestasi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga secara langsung menghambat pencapaian berbagai target dalam SDGs seperti SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 15 (Menjaga Ekosistem Darat), SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Konsep pengungkapan SDGs menuntut partisipasi dari berbagai pihak yang berperan dalam pembangunan, mencakup pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dunia usaha, kalangan akademisi, hingga elemen lainnya. Peran perusahaan

dalam mendukung pengungkapan SDGs cukup signifikan, sebab kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui tiga jalur utama, yakni aktivitas bisnis utama, kebijakan internal perusahaan, serta kegiatan investasi. Capaian perusahaan dalam mendukung SDGs umumnya tercermin dalam *annual report* maupun *sustainability report* yang dipublikasikan. Di Indonesia praktik pelaporan SDGs masih bersifat *voluntary disclosure*, karena belum terdapat regulasi yang secara tegas mewajibkan pengungkapan tersebut, sehingga keputusan untuk melaporkannya sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Menurut Umi Yuliasih (2020) alasan mengapa pengungkapan SDGs ini penting dilakukan oleh perusahaan adalah karena penerapan SDGs dapat membantu perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya sehingga dapat menciptakan bisnis yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penerapan SDGs dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan pengembangan produk bernilai tambah melalui inovasi dan keramahan sosial, meningkatkan citra perusahaan, serta meningkatkan akses ke pasar global. Di sisi lain, penelitian mengenai pengungkapan dan pencapaian SDGs juga sudah mulai dilakukan oleh para akademisi yang berkaitan dengan dampak industrialisasi perusahaan terhadap krisis ekologi dan kesejahteraan sosial (N. V. Putri et al., 2021). Menurut Paul Polman Eks CEO Unilever dalam artikelnya yang berjudul “*A Business Model for Sustainability*”, mencapai SDGs bukan hanya ‘tentang melakukan yang benar’ tetapi juga tentang bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang berfokus pada tujuan sosial dan lingkungan akan lebih kompetitif, lebih tahan terhadap risiko, dan lebih menarik bagi investor dan konsumen yang semakin sadar akan isu-isu berkelanjutan (Polman, 2018).

Penjelasan tersebut sejalan dengan teori stakeholder, di mana perusahaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada perolehan laba, melainkan juga perlu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan yang memiliki latar belakang dan tujuan yang beragam. SDGs dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk merespons kebutuhan stakeholder atas informasi non-keuangan, khususnya yang berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan (N. V. Putri et al., 2021). Keberhasilan perusahaan dalam merealisasikan target-target SDGs dapat memperkuat kepercayaan serta dukungan dari para stakeholder.. Semakin optimal pengungkapan SDGs yang direalisasikan perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan memperoleh dukungan penuh dari para pemangku kepentingan atas berbagai aktivitas yang dijalankan guna meningkatkan kinerja dan mencapai target laba. Perhatian perusahaan terhadap kebutuhan dan kepentingan stakeholder ini lahir dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan jangka panjang perusahaan, yang pada akhirnya dipandang lebih krusial dibandingkan sekadar orientasi pada peningkatan laba semata (Theresia, 2018).

Berusia ini, pertumbuhan industri hadapi pergantian dari profit oriented jadi non profit oriented (Sanjiv& Megan, 2020). Industri dengan profit oriented umumnya mengabaikan akibat yang ditimbulkan semacam kehancuran area tanpa membagikan pemecahan dari kasus yang mencuat. Sebaliknya non profit oriented senantiasa bertabiat mencari keuntungan namun lebih menuju pada pelayanan warga. Mengacu pada teori legitimasi, industri dengan tingkatan profitabilitas yang besar dinilai mempunyai keahlian lebih besar buat melaksanakan pengungkapan area selaku wujud respons terhadap tekanan legitimasi, mengingat industri tersebut

mempunyai sumber energi yang lebih memadai (Suhardi& Purwanto, 2015). Hasil riset Justina serta Meily(2024) pula meyakinkan kalau profitabilitas mempengaruhi positif terhadap tujuan pembangunan berkepanjangan. Berbeda dengan penemuan tersebut, riset yang dicoba Nabila serta Rani(2019) malah menampilkan kalau profitabilitas mempunyai pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap pengungkapan SDGs.

Pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh perusahaan dapat didukung melalui sinergi antara pemerintah dan sektor usaha, salah satunya melalui pelaksanaan serta pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Integrasi program CSR dengan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendukung percepatan pengungkapan SDGs, misalnya melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (Apriliyani & Novita, 2019). Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan CSR dinilai sebagai langkah yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar (Maimunah,2009). Selain itu, pelaksanaan CSR sejatinya bukan sekadar bersifat sukarela, melainkan telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tanpa terkecuali (Sakina dkk., 2014).

Standar pelaporan CSR sebuah perusahaan menggunakan standar yang ditetapkan oleh GRI (Global Reporting Initiative). GRI merupakan badan sekaligus pencetus standar pelaporan keberlanjutan, standar tersebut dirancang secara universal untuk perusahaan diseluruh negara. Standar terakhir yang digunakan yaitu standar GRI-4 yang sebelumnya standar GRI-3. GRI-4 merupakan standar terbaru

dan diluncurkan ditahun 2013 yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan serta informasi-informasi penting terkait isu-isu lingkungan yang paling kritikal (Mauludy,dkk.,2018).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki peran dalam mendukung pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Yuliasih (2020) dan Ajeng Luthfiyatul (2022) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Weni dan Novita (2019) yang berjudul *Implementation of CSR Programs Toward Achievement of the SDGs Target* dengan objek penelitian PT Holcim Indonesia Tbk. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi program CSR, khususnya pada aspek ekonomi, memberikan kontribusi positif terhadap pengungkapan target-target SDGs di perusahaan tersebut. Sebaliknya, program CSR di bidang sosial dan lingkungan belum terbukti memberikan pengaruh yang sama terhadap pengungkapan target SDGs. Temuan ini diduga disebabkan karena sebagian besar program CSR yang dijalankan Holcim masih terfokus pada aspek ekonomi, sehingga meskipun seluruh indikator SDGs kemungkinan telah direalisasikan secara umum oleh perusahaan, belum tampak adanya perencanaan program CSR yang secara khusus menyasar keberlanjutan masyarakat.

Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang tertentu agar setiap target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal. Sebagai agenda pembangunan yang bersifat inklusif, SDGs menjunjung prinsip kesetaraan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu, tanpa

membedakan agama, suku, ras, maupun jenis kelamin, untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pembangunan berkelanjutan. Sejak diadopsi pada tahun 2015, SDGs semakin memperkuat komitmen global terhadap terwujudnya kesetaraan gender. Komitmen tersebut tercermin dalam salah satu tujuan SDGs yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan serta menjamin kesempatan yang setara untuk menduduki posisi kepemimpinan pada berbagai tingkat pengambilan keputusan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan publik. Namun demikian, keterwakilan perempuan pada jajaran pimpinan perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut disampaikan oleh Agus Saptarina selaku Direktur Standar Akuntansi dan Tata Kelola Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan perusahaan, proporsi emiten perusahaan publik yang memiliki perempuan sebagai anggota dewan direksi maupun dewan komisaris masih berada di bawah 50 persen. Jumlah EPP untuk dewan direksi perempuan di tahun 2020 tercatat 15% atau sebanyak 420 orang dan ditahun 2021 naik menjadi 16% atau sebanyak 432 orang. Untuk jumlah EPP dewan komisaris perempuan ditahun 2019 mencapai 13% dengan jumlah 312 orang dan 2020 masih 13% dengan jumlah yang menurun menjadi 206 orang. Melihat kondisi tersebut komposisi antara pria dengan wanita dalam suatu organisasi atau sering disebut dengan Diversitas gender masih belum seimbang.

Sejak diadopsinya SDGs pada tahun 2015, tuntutan untuk mewujudkan kesetaraan gender semakin menguat dibandingkan sebelumnya. Adanya tuntutan tersebut mendorong banyak perusahaan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh individu dalam menduduki berbagai posisi penting, yang tercermin

dari semakin meningkatnya jumlah perempuan yang menempati posisi komisaris maupun direksi.

Perempuan pada era modern umumnya memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak di antara mereka yang mampu meraih posisi strategis dalam perusahaan. Perempuan juga dipandang berperan penting dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan, mengingat karakteristik yang dimiliki, seperti tingkat ketelitian yang tinggi dalam bekerja, meskipun cenderung lebih mengandalkan aspek perasaan dibandingkan laki-laki (Hadya dan Susanto, 2018).

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi menjadi isu yang semakin banyak dibahas belakangan ini. Perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menduduki berbagai tingkatan posisi dalam perusahaan, mulai dari level terendah hingga tertinggi. Penelitian Mazaya (2014) bahkan menjelaskan bahwa dalam ajaran Al-Qur'an, perempuan diberikan keleluasaan untuk berperan di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik dan ekonomi.

Motivasi utama penulis dalam melakukan penelitian ini didasari oleh ditemukannya inkonsistensi hasil-hasil penelitian terdahulu terkait variabel profitabilitas dan diversitas gender. Selain itu, penelitian yang mengaitkan kualitas CSR dengan pengungkapan SDGs masih tergolong terbatas jumlahnya, dan sejauh ini belum ditemukan penelitian serupa yang berfokus pada perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ45. Penelitian ini juga berupaya memperluas cakupan sampel dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menysasar sektor pertambangan, manufaktur, atau sub-sektor tertentu, menjadi perusahaan-

perusahaan dalam indeks LQ45, sehingga dapat mencakup keseluruhan sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai praktik pengungkapan SDGs, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan, penulis bermaksud untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, diversitas gender, dan *corporate social responsibility* terhadap pengungkapan informasi SDGs perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diajukan dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Diversitas Gender, dan CSR terhadap Pengungkapan SDDs pada Perusahaan LQ45 Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020-2025, Indonesia masih termasuk dalam kategori terhambat/perlu perhatian khusus dalam mencapai beberapa tujuan SDGs, seperti kelaparan, kesehatan, sanitasi layak, infrastruktur, tingkat kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, ekosistem laut dan daratan, serta perdamaian dan keadilan
2. Peringkat global Indonesia dalam pengungkapan SDGs menduduki posisi yang cukup rendah dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang berada di atas peringkat Indonesia.

3. Beberapa perusahaan swasta di Indonesia terbukti melakukan deforestasi secara besar-besaran dan berdampak pada pengungkapan SDGs
4. Penerbitan *sustainability report* yang juga memuat pengungkapan SDGs pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2021 mencapai 53,6% dan menduduki posisi paling rendah diantara negara-negara yang ada di wilayah ASEAN..

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh profitabilitas, diversitas gender, dan corporate social responsibility terhadap pengungkapan SDGs, dengan objek penelitian berupa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengungkapan Sustainability Report yang diukur berdasarkan indikator yang telah disusun oleh Sutopo et al. (2014). Adapun data terkait masing-masing variabel independen diperoleh dari laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan yang diterbitkan selama periode 2021-2025.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan SDGs?
2. Apakah diversitas gender dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan SDGs?
3. Apakah diversitas gender dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan SDGs?

4. Apakah corporate social responsibility memiliki pengaruh terhadap pengungkapan SDGs?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan SDGs.
2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh diversitas gender dewan komisaris terhadap pengungkapan SDGs.
3. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh diversitas gender dewan direksi terhadap pengungkapan SDGs.
4. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap pengungkapan SDGs.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya melalui kontribusinya terhadap pengembangan Teori Stakeholder secara umum, serta memperkaya materi perkuliahan yang relevan di jurusan Akuntansi maupun Ekonomi. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan akuntansi, terutama pada bidang akuntansi sosial dan lingkungan, sekaligus

memperkuat konsistensi temuan mengenai variabel-variabel yang memengaruhi pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi perusahaan yang mendukung pengungkapan SDGs sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

2. Bagi Bursa Efek Indonesia dan Analisis Pasar Modal

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Bursa Efek Indonesia dan analisis pasar modal dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan, khususnya yang memiliki komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penyusunan rekomendasi investasi bagi calon investor, sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi pengungkapan SDGs serta memperkuat kinerja keberlanjutannya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kontribusi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 terhadap

pengungkapan SDGs. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pengungkapan target-target pembangunan berkelanjutan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat komitmen perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 dalam mengungkapkan informasi terkait SDGs melalui *Sustainability Report*. Selain menambah wawasan masyarakat mengenai isu-isu keberlanjutan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya calon investor, dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada perusahaan yang memiliki komitmen terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

